

Analisis Faktor Penentu Penerimaan Pajak Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi

Asrida¹, Hakim Muttaqim² dan Sriwinar³

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Almuslim Bireuen Aceh

³Program Studi Informatika FIKOM Universitas Almuslim Bireuen Aceh

asrida03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penengah. Analisis regresi dengan data sekunder dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kepatuhan pajak dan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Uji Sobel menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dan pengeluaran pemerintah tidak secara signifikan memediasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Namun, indeks pembangunan manusia secara signifikan memediasi hubungan tersebut.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Pajak dan belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Sesuai dengan pandangan Keynesian, intervensi pemerintah melalui pengeluaran dapat merangsang permintaan agregat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahri (2020) menyatakan bahwa dalam konteks kebijakan fiskal, hubungan erat terdapat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan pengeluaran oleh pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi dapat memicu kenaikan anggaran pemerintah untuk program-program yang menunjang kemajuan ekonomi. Peningkatan alokasi dana pada sektor kesehatan dan pendidikan tidak hanya mendongkrak kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak positif ini pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Inti dari kebijakan ini terletak pada fokus terhadap penerimaan pajak dan belanja pemerintah, di mana kedua aspek ini saling terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi.

Selama kurang lebih dua dekade terakhir, telah terjadi perubahan dalam sistem perpajakan di wilayah-wilayah Indonesia. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan wilayah, yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerimaan pajak daerah terhadap IPM di Indonesia, serta mengkaji bagaimana reformasi perpajakan daerah dapat mengoptimalkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan pajak untuk pembangunan wilayah.

Harapannya, pemerintah daerah akan terus meningkatkan efisiensi reformasi perpajakan daerah untuk memaksimalkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Menurut Saragih A. H. (2019), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator signifikan yang menilai kemajuan suatu negara. IPM dihitung berdasarkan harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup,

memberikan pandangan menyeluruh mengenai kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Alat ukur ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi kualitas pembangunan, tetapi juga mengelompokkan negara ke dalam kategori maju, berkembang, atau tertinggal. Lebih lanjut, IPM berperan penting dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Data yang tersedia menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah, IPM, penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pewajib pajak merupakan suatu entitas yang memiliki kewajiban membayar pajak dalam suatu periode tertentu. Menurut data Kementerian Keuangan, persentase peningkatan jumlah Wajib Pajak di Indonesia tercatat pada periode waktu tertentu, mencerminkan tren pertumbuhan yang positif. Dari awalnya sebesar 73,06%, persentase Wajib Pajak meningkat secara signifikan menjadi 77,63% pada periode selanjutnya. Bahkan, terjadi lonjakan lebih tinggi mencapai 84,07%, menandakan peningkatan konsisten dalam jumlah individu atau entitas yang memenuhi kewajiban pajak. Puncaknya terjadi pada 83,2%, menunjukkan partisipasi aktif sebanyak 83,2% dari populasi yang berkewajiban membayar pajak. Selama periode observasi, pertumbuhan ini mencapai angka mencolok sebesar 15,41%, mencerminkan upaya dan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di antara Wajib Pajak. Data ini memberikan gambaran positif tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting.

Adapun data di atas dapat dijelaskan bahwa Data pengeluaran pemerintah dalam milyar Rupiah, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menunjukkan variasi selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, total pengeluaran pemerintah mencapai 396.055.585.953 milyar Rupiah. Mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 406.537.379.382 milyar Rupiah, dan tetap pada level yang sama pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, dengan total pengeluaran mencapai 385.592.320.743 milyar Rupiah. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana pemerintah mengeluarkan dana sebesar 388.223.705.056 milyar Rupiah. Data ini memberikan gambaran tentang dinamika keuangan pemerintah selama beberapa tahun terakhir dan dapat menjadi indikator kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan ekonomi.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM %) mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, IPM % tercatat sebesar 71,8%, mengalami kenaikan sedikit pada tahun berikutnya, mencapai 73%. Namun, terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021, dengan IPM % menurun menjadi 49%. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi lonjakan besar-besaran kembali, mencapai 86%, menandakan peningkatan yang signifikan dalam indikator pembangunan manusia. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, dengan IPM % sebesar 84%, data tersebut menunjukkan variasi yang cukup besar dalam pencapaian pembangunan manusia selama periode waktu yang diamati. Fluktuasi ini dapat mencerminkan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami perubahan yang tidak stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah pajak yang diterima mencapai 1.546,141,9 miliar Rupiah. Terjadi penurunan pada tahun 2020, dengan penerimaan mencapai 1,285,136.32 milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan kembali, dengan penerimaan mencapai 1,547,841.1 milyar Rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana penerimaan pajak mencapai 1,924,937.5 milyar Rupiah. data terakhir menunjukkan penerimaan pajak sebesar 2,016,923.7 milyar Rupiah. Dengan demikian, data ini mencerminkan variasi dalam penerimaan pajak selama periode tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan fiskal.

Berdasarkan informasi dari World Statistics, laju perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia menunjukkan tren naik turun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, ekonomi mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,02%. Namun, di tahun 2020, terjadi kemerosotan signifikan hingga -2,07%, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Perkembangan positif kembali terlihat pada tahun 2021, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,83%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%. Pada tahun 2023, perkiraan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,5% hingga 5,3%, menunjukkan ketidakpastian atau variasi yang mungkin terjadi. Data ini mencerminkan dinamika ekonomi Indonesia selama periode tersebut, dengan tantangan dan potensi pemulihan yang terlihat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Fokus utama penelitian ini adalah subjek penelitian, yang memegang peran penting dalam upaya menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Tiga komponen utama membentuk subjek penelitian: variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. Variabel bebas mencakup wajib pajak, belanja pemerintah, dan indeks pembangunan manusia. Penerimaan pajak berperan sebagai variabel terikat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel perantara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan seksama, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap kelancaran pelaksanaan penelitian. Dalam studi ini, Indonesia dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian.

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif, yang menitikberatkan pada pengolahan dan interpretasi data numerik. Pendekatan ini mengutamakan analisis terhadap informasi yang dapat dikuantifikasi, berupa angka-angka yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Metode penelitian melibatkan tahapan pertanyaan riset dan prosedur penelitian yang ditetapkan, pengumpulan data, serta analisis data. Data yang digunakan diambil dari sumber sekunder, yakni data yang meliputi periode sepuluh tahun dari 2014 hingga 2023, yang diperoleh dari situs web BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Indonesia, dengan letak geografis yang istimewa, melintang dari 6° LU hingga 11° LS dan 95° BT hingga 141° BT, serta terbelah oleh garis khatulistiwa, menampilkan keragaman wilayah yang luar biasa. Luasnya mencapai 5.148 km panjang dan 1.931 km lebar, dengan total daratan seluas 1.919.440 km² dan perairan laut seluas 3.273.810 km². Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 16.056 pulau dan dibagi menjadi tiga zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Berdasarkan statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2024, populasi Indonesia mencapai 273,90 juta jiwa.

Pihak yang terlibat sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perpajakan (Atarwaman, 2020). Dalam ranah ini, wajib pajak dapat berupa individu atau badan hukum yang secara penuh menyadari dan mematuhi peraturan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap negara. Dengan kata lain, status sebagai wajib pajak menandakan bahwa mereka diharapkan untuk secara aktif turut serta dalam mendukung pendanaan pembangunan negara dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan alokasi anggarannya dengan fokus pada pembangunan

infrastruktur guna menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung momentum pertumbuhan tersebut dengan lebih aktif.

Pendapatan pajak berperan secara krusial sebagai sumber utama pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak kewajiban pajak, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap pendapatan pajak, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara faktor-faktor tersebut

Data yang disampaikan oleh BPS menunjukkan fluktuasi dalam penerimaan pajak (dalam miliar Rupiah) dari tahun 2012 hingga 2023. Pada tahun 2012, jumlah penerimaan pajak mencapai 9805,18.1 miliar Rupiah dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan jumlah 1,546,141.90 miliar Rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan penerimaan sebesar 1,285,136.32 miliar Rupiah. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan kembali, dengan penerimaan mencapai 1,547,841.1 milyar Rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana penerimaan pajak mencapai 2,034,552.50 milyar Rupiah. data terakhir menunjukkan penerimaan pajak sebesar 2,118,348.00 milyar Rupiah. Dengan demikian, data ini mencerminkan variasi dalam penerimaan pajak selama periode tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan fiskal.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan keseluruhan pendapatan nasional suatu negara atau peningkatan produksi dalam jangka waktu tertentu. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi juga mencakup perkembangan dalam kapasitas fisik produksi barang dan jasa yang meningkat seiring berlalunya waktu.

Berdasarkan data *World Statistik*, dinamika ekonomi Indonesia yang tercermin dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan variasi signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Perkembangan ekonomi negara ini ditandai oleh naik turunnya angka pertumbuhan, mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,727,083.4 miliar rupiah, menandakan kinerja ekonomi yang menggembirakan yang terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 10,949,155.4 miliar rupiah. Namun demikian, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan menjadi 10,722,999.3 miliar rupiah, yang kemungkinan dipicu oleh dampak pandemi global COVID-19. Perkembangan positif kembali terlihat pada tahun 2021, dengan produk domestik bruto mencapai 11,120,059.7 milyar rupiah, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 11,710,247.9 milyar rupiah. Pada tahun 2023, perkiraan pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 12,301,393.6 milyar rupiah. Data ini mencerminkan dinamika ekonomi Indonesia selama periode tersebut, dengan tantangan dan potensi pemulihan yang terlihat dari tahun ke tahun.

Pembahasan

Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Berdasarkan penelitian mengenai jalur analisis, ditemukan bahwa kontribusi wajib pajak terhadap perkembangan ekonomi tidaklah signifikan. Oleh karena itu, langkah penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Temuan ini menyoroti pentingnya strategi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, termasuk upaya untuk memperbaiki sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak. Dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak yang kemudian

dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Menurut temuan dari analisis jalur, ditemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak berdampak secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ini menggambarkan bahwa walau pengeluaran pemerintah meningkat, pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan yang berarti. Salah satu penyebabnya mungkin karena pemerintah daerah di Pulau Madura kurang memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang produktif dan berpotensi, seperti pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi tampaknya kurang mendapat perhatian dalam alokasi anggaran. Selain itu, kekurangan investasi fisik seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur juga dapat membatasi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, hal ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar pengeluaran tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Situasi ini menunjukkan bahwa pembagian anggaran oleh pemerintah tidak cukup efektif dalam menciptakan efek berlipat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian proporsi alokasi anggaran. Bagian besar dari pengeluaran pemerintah dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendorong ekonomi dan kurang mampu menghidupkan kembali perekonomian.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Berdasarkan hasil analisis jalur, terbukti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dianggap sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas individu, yang kemudian menjadi modal utama untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan produktivitas. Proses pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kesehatan menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas. Peningkatan sektor kesehatan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena hal ini akan berdampak pada partisipasi tenaga kerja di masa depan yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan produksi, dan ultimately mendorong pertumbuhan ekonomi

Kesejahteraan suatu wilayah bisa dinilai dengan mempertimbangkan pendapatan per kapita, yakni jumlah pendapatan yang diterima oleh rata-rata individu dalam wilayah tersebut dalam satu tahun. Jika pendapatan per kapita meningkat, ini menunjukkan peningkatan dalam taraf hidup masyarakat secara umum.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak; Menurut analisis jalur path, tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak. Penemuan ini menyoroti bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, melainkan juga secara langsung memengaruhi jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memiliki wajib pajak yang mematuhi kewajibannya dengan baik, seiring dengan efektivitas dalam penagihan pajak. Kombinasi dari kedua faktor ini memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan proyek-proyek pembangunan dan layanan publik.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak; Dari penelusuran jalur, dapat disarikan bahwa tampaknya pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan pajak. Namun, perlu dicatat bahwa peran belanja pemerintah tetap krusial

dalam membentuk kesuksesan serta kelangsungan sistem perpajakan negara ini. Dengan adanya pengaruh positif antara realisasi belanja pemerintah dan penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan belanja pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan melalui sumber pajak. Dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi dan secara efektif meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak; Analisis lintasan menggambarkan bahwa peningkatan indeks Pembangunan Manusia secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak. Ini menandakan bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pendapatan pajak lokal dengan kemajuan sosial dan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang positif antara penerimaan pajak lokal dan indeks Pembangunan manusia, dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan dari pajak lokal telah dimanfaatkan secara efisien oleh pemerintah setempat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Manajemen yang teliti terhadap penerimaan pajak lokal dapat mengarahkan dana tersebut ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan dalam indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh penerimaan pajak Terhadap pertumbuhan ekonomi; Dari analisis lintasan jalan, dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan pajak. Sudut pandang yang beragam bisa digunakan untuk menjelaskan dampak menguntungkan ini. Dalam lingkup evaluasi kebijakan, perubahan dalam struktur perpajakan daerah terbukti berhasil karena ditemukan bahwa penerimaan pajak berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks teori agensi, ketika penerimaan pajak daerah melampaui target yang ditetapkan, kecenderungan konflik agensi menjadi minim karena kewajiban wajib pajak dipatuhi dengan lebih baik. Penurunan konflik ini berdampak positif pada penerimaan pajak, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Fenomena ini tercermin dalam tren peningkatan penerimaan pajak daerah dari waktu ke waktu.

Dalam kajian efisiensi perombakan pajak lokal, penelitian ini menunjukkan pencapaian yang signifikan. Misi di balik transformasi pajak ini adalah memperkaya pendapatan daerah dari sumber pajak, sebuah langkah yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan publik melalui pertumbuhan ekonomi serta pembangunan lokal. Namun, pencapaian ini hanya sebagai langkah awal; masa depan ekonomi kita sangat bergantung pada pengalokasian pendapatan pajak untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ketika pendapatan pajak dialirkan ke proyek-proyek yang produktif dan potensial menghasilkan efek domino yang positif, kesempatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar muncul, menyokong kesejahteraan kolektif bagi seluruh penduduk Indonesia. Seperti yang diperhatikan dalam studi oleh Saragih (2018), peningkatan penerimaan pajak tidak selalu menunjukkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dana pajak yang kurang efisien bisa menjadi penyebabnya, di mana alokasi tidak terfokus pada proyek atau kegiatan yang menghasilkan. Untuk memperbaiki efektivitasnya, reformasi dalam sistem perpajakan memerlukan kolaborasi yang erat antara pihak berwenang pajak, pembayar pajak, dan pemerintah secara menyeluruh. Kolaborasi yang terus-menerus dari semua pihak akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memediasi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak; Berdasarkan penelitian dalam analisis lintasan, kesetiaan wajib pajak tak menunjukkan dampak yang besar pada pendapatan pajak yang berasal dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pendapatan pajak lebih bergantung pada tingkat kesetiaan langsung dari para wajib pajak. Meskipun peningkatan penerimaan pajak dapat

terjadi, namun efek dari peningkatan tersebut harus dipandu melalui pengeluaran pemerintah. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun dampaknya terhadap penerimaan pajak juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan ketersediaan informasi perpajakan yang transparan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memediasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak; Hasil evaluasi lintasan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak yang berarti terhadap penerimaan pajak melalui perkembangan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebuah langkah fiskal yang bisa diambil adalah meningkatkan belanja pemerintah. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga basis pajak akan menjadi lebih kuat dan penerimaan pajak akan meningkat secara signifikan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memediasi Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penerimaan Pajak; Berdasarkan hasil evaluasi jalur, disimpulkan bahwa peningkatan dalam indeks pembangunan manusia secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks analisis jalur tersebut, peningkatan dalam pembangunan manusia memberikan dampak yang menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi positif pada penerimaan pajak. Secara sederhana, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Ketika manusia mengalami perkembangan yang optimal, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi individu mereka. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya yang lebih baik. Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas dan produktivitasnya. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak mendorong kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memperkuat kemampuan untuk membayar pajak. Ini akan membentuk dasar pajak yang lebih solid, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan diskusi di bab sebelumnya, kita dapat sampai pada beberapa kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Model I, dapat disimpulkan bahwa meskipun hubungan antara kepatuhan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlalu kuat, indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Analisis Model II menunjukkan bahwa baik pengeluaran pemerintah maupun kepatuhan pajak wajib tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi justru memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh mediasi, maka dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini lebih bagus tanpa menggunakan mediasi. Hal ini dikarenakan tanpa menggunakan variabel mediasi, secara langsung variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Diperlukan penerapan aturan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan keterbukaan informasi dalam proses pemungutan pajak daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pengeluaran pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang beragam, mencegah penggelapan pajak, dan memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada warga.
2. Tambahan dari itu, tugas pemerintah juga mencakup pemilihan serta pengawasan terhadap kebijakan pengeluaran. Tujuannya adalah agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat, sambil mencegah kerugian atau penyalahgunaan dana yang telah dialokasikan.
3. Agar wilayah-wilayah dengan pertumbuhan PDB yang masih rendah dapat mengalami peningkatan, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki potensi. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi, penerimaan pajak di daerah tersebut akan meningkat, sementara pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur potensial akan membuka peluang penerimaan pajak lebih lanjut dari berbagai bisnis yang turut berkembang seiring pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Wahyuni, S., & Asrida, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penerimaan Pajak (Analisis Data Tahun 2012-2023). *Jurnal Ekonomi & Pembangunan-FE UMUSLIM*, 16(1), 7-13.
- Asrida, A. (2015). Analisis Pertanggungjawaban Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) di Kabupaten Bireuen. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 14, 145131.
- Asrida, A., & Haryani, H. (2023). Pengaruh Interaksi Keinginan dan Kemampuan Usahawan Terhadap Keberhasilan Usaha Minuman Boba di Kota Bireuen. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 7(2).
- Chairil Anwar Pohan, 2013, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ernalis, F., Jahidin, T., & Iqbal, M. (2024). Optimalisasi Prinsip Good Governance untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 167-181.
- Haryani, H., & Asrida, A. (2021). PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG DAN NILAI TUKAR TERHADAP EKSPOR DI INDONESIA. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 5(5).
- Jamaluddin, J., Iqbal, M., Patria, A., Yahya, Z., & Jahidin, T. (2022). Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan pada BPKD Kabupaten Bireuen. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 414-420.
- Liberti Pandiangan, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.